

STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PENERAPAN PTNBH

Feliza Zubair¹, Retasari Dewi² dan Ade Kadarisman³
Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Padjadjaran
felizaherison@yahoo.co.id¹, retasari.dewi@unpad.ac.id²

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam membangun pemahaman mahasiswa IPB terhadap penerapan PTNBH. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara mendalam dilakukan kepada Kabid Humas IPB dan Ketua Bem IPB, observasi dan studi pustaka. Teori yang digunakan adalah Kontruksi Atas Realitas, teori Stakeholder, teori Relationship Management dan konsep Komunikasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak IPB mengkonstruksi esensi dari PTNBH yaitu otonomi, keleluasaan dalam penyelenggaraan rumah tangganya untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, ke dalam program-program yang dapat mendukung kemajuan mahasiswa. IPB dapat membangun hubungan manajerial yang alamiah dengan mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang dilakukan lembaga dapat membentuk kesepahaman dalam upaya menjaga relasi yang saling menguntungkan antara pengelola atau manajemen IPB/PTNBH dengan mahasiswa.

Kata kunci: PTNBH, Strategi, Komunikasi publik, Otonomi

Abstract. The purpose of the research is to analyse the strategy of public communication implemented by Institut Pertanian Bogor (IPB) in developing comprehension of its students towards PTNBH implementation. Method used is qualitative with case study approach. Deep interview is done with Public Relations Head of IPB and Head of BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa or Students Executive Board). In addition, this research involves observation and literature study. Theories used in this research are social construct of reality, stakeholder theory, relationship management, and public communication. Result shows that IPB has constructed the PTNBH's essence of autonomy, freedom in managing its own administration of high quality education, programs in supporting students' activities. IPB has the capabilities of developing a natural managerial connection with its students. The result also shows that public communication strategy implemented by institution would be able to create understanding and beneficial relationship between administrator/management of IPB and its students.

Keywords: PTNBH, Strategy, Public communication, Autonomy.

PENDAHULUAN

Keberadaan mahasiswa pada suatu perguruan tinggi merupakan aset yang penting. Tidak saja sebagai konsumen yang membeli jasa pendidikan, namun mahasiswa memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, agen perubahan dan pembangunan di masa depan. Mendidik mahasiswa adalah mendidik “hari depan” bangsa, sehingga perlu disadari betapa

pentingnya keberadaan mahasiswa pada suatu perguruan tinggi.

Dengan kemampuan intelektualnya mahasiswa seringkali bersikap kritis sehingga mampu menjadi pengontrol kehidupan sosial di sekitarnya. Berbagai kritik, saran dan solusi disampaikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Tidak jarang para mahasiswa menjadi penggagas sekaligus pelaku perubahan, meskipun “cara” yang digunakan



mengarah pada demonstrasi, mimbar bebas bahkan terkadang anarkis.

Berkaitan dengan perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum atau PTN-BH pada beberapa tahun terakhir telah memunculkan reaksi “keras” dari para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.. Status PTN-BH kerap menimbulkan keresahan dikalangan mahasiswa, antara lain: Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa UNHAS (Universitas Hasanudin-Makasar) terjadi tidak lain karena menolak komersialisasi dan privatisasi akibat penerapan PTN-BH yang dianggap akan merugikan mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik maupun nonakademik, karena kebijakan yang dirumuskan birokrat hanya dapat menyasar pada keuntungan finansial. (<https://siarpersma.id/2017/08/27/ptn-bh-perayaan-kemunduran-demokrasi/>, n.d.)

Peristiwa lain dikutip dari detik.com, adalah ketika ribuan mahasiswa UGM tetap bertahan menggelar aksi demo yang berlangsung sejak pagi. Sebagian besar mahasiswa duduk sambil mendengarkan orasi di halaman Balairung UGM, Senin (2/5/2016). Mereka menuntut “Revolusi Pendidikan.” Bendera Merah Putih yang berada di halaman Balairung ini sengaja berkibar setengah tiang. Puluhan spanduk dan poster terpasang di tembok Rektorat diantaranya bertuliskan, "Revolusi Pendidikan," "Selamat Datang di Kampus Universitas Gudang Masalah," "Save Bonbin, Tolak Relokasi," "Judicial Review PTN-BH," dan lain-lain, Mahasiswa menuntut agar Rektor UGM turun untuk menemui para mahasiswa. News detik.com. (<https://news.detik.com/berita/3201835/ribuan-mahasiswa-ugm-masih-demo-hingga-sore-ini-polisi-berjaga-jaga>, n.d.)

Kenyataan di atas membuat setiap perguruan tinggi negeri berusaha untuk menjalin pengertian dan memenuhi harapan mahasiswanya, antara lain dengan berusaha menanamkan pengertian positif tentang status PTNBH itu sendiri. Berbagai aksi dan reaksi

yang terjadi umumnya didasari oleh “kurangnya” pemahaman pihak *stakeholder* perguruan tinggi terutama mahasiswa mengenai perubahan status PTN menjadi PTNBH di Indonesia.

Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) adalah salah satu konsep penyelenggaraan perguruan tinggi yang memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi yang diberikan awalnya merupakan solusi pemerintah untuk mempertegas penetapan status perguruan tinggi sebelumnya yaitu BHMN.

Konsep PTN-BH atau Perguruan Tinggi Berbadan Hukum merupakan kepercayaan dan suatu prestasi yang diberikan bagi PTN-PTN terpilih dalam menjaga kualitas serta prestasi para mahasiswanya baik di tingkat nasional maupun internasional. Otonomi yang diberikan kepada PTN memungkinkan PTN tersebut untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan semaksimal mungkin khususnya dalam meningkatkan kualitas dosen maupun mahasiswanya. PTN-BH dapat mengatur diri sendiri dan diberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan rumah tangganya untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum menurut pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012, merupakan suatu peningkatan bagi PTN yang dievaluasi memiliki kinerja cukup baik. Adapun dalam penerapannya PTN-BH memperoleh kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tingginya (bidang keuangan, sarana prasarana dan ketenagakerjaan). Otonomi yang dimiliki PTN-BH ini ternyata masih banyak menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kurangnya pemahaman nilai/hakekat/norma tentang perubahan, masih rancunya persepsi aplikasi PTN-BH sehingga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan aturan. Belum adanya manajemen/ pengelolaan komunikasi publik yang dapat membangun kesamaan pemahaman publik tentang manfaat perubahan tersebut, tidak hanya pada tingkat perguruan

tinggi akan tetapi juga pada tingkatan pemerintah dan lembaga legislatif.

Pada umumnya pemasalahan terjadi pada aspek tata kelola, sumber daya dan keuangan dimana aspek-aspek ini merupakan pendukung dalam implementasi PTN-BH. Kemandirian dalam pengelolaan ini merupakan tanggung jawab bersama para pengelola, namun dengan pemahaman terbatas penanganan semua aspek menjadi tidak maksimal. Penterjemahan “otonomi” menjadi kebebasan “tanpa batas” setiap PTN-BH dalam mengelola sistem keuangan menimbulkan berbagai prasangka seperti penentuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang setinggi-tingginya, hilangnya hak-hak mahasiswa seperti uang praktikum, dana kegiatan ekstra kurikuler dan lainnya. Keluhan dari para tenaga pendidikan yang kehilangan beberapa hak yang biasa mereka dapatkan salah satunya adalah tunjangan pendidikan atau Tunjangan Kinerja (Tukin). Sistem penggajian dosen yang tidak proporsional akibatnya menurunkan semangat kerja.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Humas IPB:” Saya cerita yang internalnya dulu ya bu, internal ini tentu *stakeholders*-nya mahasiswa, dosen dengan pegawai. *Nah*, tentu mungkin dialami oleh perguruan tinggi lain ya, perubahan sesuatu yang biasanya A kemudian tiba-tiba kemudian menjadi B, ada dinamika resistensi, ketidaksiapan, ketidaksukaan, kaget. *Nah* itu juga kami alami, yaitu banyak pro-kontra, yaitu dalam para dosen juga *kan* tajam *gitu* ya perbedaan terkait dengan itu.” Apa yang disampaikan Ibu Siti Nuryati, S.TP., M.Si adalah realitas yang terjadi hampir pada semua PTN yang berubah statusnya menjadi PTN-BH.

Bagi Mahasiswa pada umumnya kehadiran PTN-BH membangun berbagai persepsi dan aksi. PTN-BH membuat perguruan tinggi tidak lagi berkonsentrasi pada Tridharma Perguruan Tinggi karena harus mengikuti permintaan “pasar”. Dalam hal ini dimaknai munculnya “komersialisasi” dalam dunia

pendidikan dimana perguruan tinggi harus membiayai “diri sendiri”, Uang Kuliah Tunggal (UKT) melambung tinggi karena digunakan untuk semua kegiatan operasional kampus ([https://www.kompasiana.com/ratnapratiwi/pe-rguruan-tinggi-negeri-badan-hukum-di-indonesia., n.d.\)](https://www.kompasiana.com/ratnapratiwi/pe-rguruan-tinggi-negeri-badan-hukum-di-indonesia., n.d.))

Peran Humas Universitas sangat berperan di dalam mengantisipasi dan menangani masalah ini, salah satunya dengan pengelolaan komunikasi publik yang maksimal oleh Humas PTN, seperti halnya penanganan reputasi melalui komunikasi digital (Maudia et al. 2018), juga dalam (Ilmiati 2016) lembaga PR berperan dalam menjaga juga mengkontruksi citra baik Perguruan tinggi, Penelitian (Herdiana and Khoiruddin 2016) juga mengemukakan pentingnya humas dalam meningkatkan citra secara eksternal. Keresahan yang terjadi di kalangan mahasiswa maupun *stakeholder* PTN lainnya adalah akibat kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pihak PTN terkait perubahan staus menjadi PTN-BH inilah pentingnya humas, dalam penelitian (Annisarizki 2015) humas memang mempunyai pemecah masalah dalam berkomunikasi pada institusi dan publik, bila humas tersumbat yang terjadi kemudian para mahasiswa serta sivitas akademik yang terkena dampaknya kemudian mencari sendiri informasi tentang PTNBH dari berbagai sumber dan terbentuklah opini yang keliru serta berbeda-beda. Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan serta menimbulkan sikap pro dan kontra terhadap pengelola.

Adapun fungsi Hubungan Masyarakat menurut *The British Institute of Public Relations*, dalam (Effendi,2008:134) adalah upaya yang mantap, berencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina pengertian bersama antara organisasi dan khalayaknya. Dalam melaksanakan fungsinya Humas PTN harus peka terhadap pendapat umum dan harus cepat tanggap menanganinya. Bila berbagai opini dibiarkan merebak tanpa kendali, dapat menimbulkan

meresahkan pada *stakeholder* khususnya mahasiswa yang terkena dampak langsung akibat perubahan status tersebut, diperteguh dalam penelitian (Rini et al. 2017) bahwa humas mengerem opini yang tidak baik di perguruan tinggi dalam meningkatkan harmonitas lembaga.

Ibu Nur menyampaikan langkah awal yang dilakukan oleh IPB berkaitan dengan keberadaan mahasiswa mereka (IPB),

“kedua digrup mahasiswa, kalau di grup mahasiswa kami punya grup banyak, kalau mahasiswa ini berdasarkan jenis organisasinya, jadi ada yang grup itu ormawa, jadi seluruh organisasi kemahasiswaan mulai dari BEM pusat, BEM fakultas, himpunan profesi, sampai UKM (unik kegiatan mahasiswa) nah kami ada di grup tersebut. Jadi kalau mahasiswa ada di sisi aktivis, dan strukturnya itu ada hal-hal yang terkait dengan apa yang mereka rasakan dengan perubahan-perubahan di institusi mereka, nah kami coba jembatankan dengan forum diskusi tersebut. di grup dan kemudian bisa kopi darat. Jadi kalau bu ini tidak cukup (diobrolkan) di grup, ya...udah monggo kalian cari waktu kapan yang nyaman, kemudian kami menjembatani untuk ngobrol diskusi”.

Penelitian ini berkaitan dengan kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas IPB terutama strategi komunikasi publik yang dilakukan dalam membangun pemahaman mahasiswa IPB terhadap penerapan PTN-BH. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui: Hal-hal apa saja yang melatar belakangi IPB menerapkan strategi komunikasi publiknya; Bagaimana IPB menerapkan dan mensosialisasikan penerapan PTNBH ini; Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap keberadaan PTN-BH di Institut Pertanian Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui pendekatan studi kasus peneliti akan melakukan pendekatan dari berbagai sisi yang menjadi ciri khas dari studi ini. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan penelitian berkaitan dengan *how* dan *why* (Yin 2012:1).

Dalam aplikasinya studi kasus dapat dilakukan pada penelitian mengenai perkembangan sesuatu, dapat pula memberi gambaran tentang keadaan yang ada. Dalam penelitian ini digunakan studi kasus karena objek penelitian yang dikaji merupakan system yang unik, spesifik dan khusus, yaitu perguruan tinggi berbadan hukum yang melakukan kegiatan komunikasi publik sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap publik namun didasari oleh kesadaran institusi dalam menyelenggarakan konsep “otonomi” secara tepat. .

Studi kasus menurut (Denzin dan Lincoln 2009:300) adalah suatu penelitian yang spesifik dimana tema-tema yang diteliti bersifat khusus. Kasus adalah suatu sistem yang terbatas atau *bounded system*. Dalam bahasa umum maka studi kasus adalah penelitian yang dibingkai secara khusus, keterbingkai (*boundedness*) memberi arah pada penelitian studi kasus, seperti pola-pola perilaku dari sistem yang diteliti dapat membantu penelitian dalam memahami sebuah kasus.

Kasus memiliki bagian-bagian operasional, memiliki tujuan dan bahkan memiliki jiwa (Denzin & Lincoln 2009:300),semua menjadi sistem yang terpadu, namun dalam pendekatannya peneliti tidak dapat fokus pada satu kasus tanpa menyelami konteks disekitar kasus tersebut. Selagi peneliti mengkaji suatu kasus maka kompleksitas dari kasus tersebut akan menguras energi peneliti yang terbatas.

Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Strategi Komunikasi Publik pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia, sample dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan terlebih dahulu menentukan *stakeholder* dan pengelola komunikasi publik pada PTN-BH, yaitu Institut Pertanian Bogor. *Stakeholder* adalah mahasiswa IPB dan pengelola komunikasi publik adalah bagian Humas IPB.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: observasi atau pengamatan langsung, wawancara mendalam (*depth interview*) yang dilakukan para pengambil kebijakan, para penanggung jawab dan *stakeholder* IPB; studi pustaka. Studi referensi bahan pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder tentang strategi peningkatan kualitas komunikasi publik dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber dan *stakeholder* untuk menjangkau permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pedoman dan memberi arah pada peneliti dalam mengungkapkan realitas (fenomena) yang diteliti. Adapun teori-teori tersebut adalah :

Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*Social Construction of Reality*), menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter.L.Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul "*The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge*" (1996). Teori ini menganggap bahwa realitas sosial eksis dengan sendirinya dan struktur dunia sosial bergantung pada manusia yang menjadi subjeknya (Kuswarno 2013:11). Bersama Thomas Luckmann kemudian Berger mengembangkan

pemikiran tentang "konstruksi sosial" yang menjelaskan bahwa seseorang dalam kehidupannya mengembangkan suatu perilaku yang repetitif (habits/kebiasaan). Kebiasaan ini memungkinkan seseorang mampu mengatasi suatu situasi secara otomatis dimana hal tersebut berguna juga untuk orang lain.

Berdasarkan kenyataan sosial, unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah masyarakat. Yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma, baik itu norma adat, agama, moral dan lain-lain yang akan membentuk sebuah struktur sosial yang besar atau suatu institusi dalam penelitian ini yaitu Institut Pertanian Bogor.

Stakeholder Theory

Teori ini dikemukakan oleh Jones, Thomas dan Andrew (1999) dalam (Ardianto 2011:76) menyatakan bahwa *Stakeholder Theory* mempunyai asumsi, bahwa perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok kepentingan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan. Dan teori ini juga memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, pengelola IPB mengelola dan mengendalikan perguruan tinggi tidak sebatas didasarkan pada *economic motive*, namun juga *social motive*.

Relationship Management Theory

Teori ini dikembangkan oleh John Ledingham dan Steven Bruning dalam (Kriyantono 2014:28). Perspektif *Relationship Management* menyatakan bahwa *public relations* untuk dapat menyeimbangkan kepentingan organisasi dengan publiknya dapat dicapai melalui pengelolaan hubungan antara organisasi dan publik.

Perspektif relational telah dieksplorasi dalam berbagai konteks fungsi *public relations*, termasuk *public affairs*, *community relations*, manajemen isu, manajemen kritis, dan *media relations*. Keterkaitan teori ini dengan penelitian adalah apa yang harus dikerjakan PR atau

Humas perguruan tinggi melalui kegiatan komunikasi publik adalah bertujuan untuk membina hubungan baik dengan publik, menciptakan mutual understanding antara institusi dengan komunitas (*stakeholder*).

Hasil penelitian menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang Humas IPB penerapan strategi komunikasi publiknya. IPB menerapkan PTN-BH adalah karena lembaga mereka dianggap layak untuk memiliki status PTN-BH. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 syarat PTN untuk memiliki status PTN-BH adalah telah melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi serta pengelolaan perguruan tinggi dengan baik pada bidang finansial, salah satunya yaitu telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut. IPB sebelumnya berstatus BHMN sehingga perubahan yang terjadi juga tidak terlalu signifikan, namun status PTN-BH membuat lembaga menjadi lebih “mantap” melakukan pembenahan.

Ketika status PTN-BH di IPB diberlakukan tahun 2013 maka pihak lembaga langsung melakukan berbagai pembenahan dalam pengelolaan kampus secara keseluruhan. Meskipun tidak mudah mereka mencoba menata sistem komunikasi publik yang tepat, seperti yang disampaikan narasumber Kabid Kehumasan IPB, ” Kalau di awal-awal tahun 2013 waktu itu memang yang paling banyak media konvensional, newsletter yang menjadi andalan. Dan itu secara frekuensi dari tahun ke tahun terus berubah...,” Ibu Siti menjelaskan bahwa strategi komunikasi publik mereka bersifat dinamis, dalam arti berubah mengikuti kemajuan jaman dan teknologi.

Humas IPB menyesuaikan penggunaan media dalam komunikasi publik mereka dengan media yang banyak digunakan oleh mahasiswa IPB, hal ini dilakukan agar informasi dapat tepat sasaran. Namun demikian beberapa media konvensional yang dianggap efektif masih mereka gunakan. “Selain media cetak, era gini masih medsos. Cetak masih ada, tapi dikurangi, kami tingkatkan di *social media*-nya. Karena

memang paling efektif. Kalau di dunia mahasiswa, mahasiswa adalah pengguna line sejati. Jadi kita main di line.”

Informasi melalui media cetak internal dan selebaran masih digunakan oleh Humas IPB meskipun jumlahnya tidak banyak. “Paling cetak kami taruh di kantin. Tapi sebenarnya juga udah jarang, tetep kami terbitkan tapi dalam jumlah terbatas, lebih besar kami share via medsos.” Ibu Siti menambahkan bahwa pemantauan media sosial oleh admin Humas berlangsung hamper 24 jam. Pemantauan lini masa melalui media sosial Line, Whatsapp group, Twitter, dan Facebook secara maksimal karena mengikuti perkembangan zaman. Cara ini dilakukan agar pihak pengelola universitas tetap menjaga arus informasi yang berlangsung pada seluruh tingkatan atau birokrasi, khususnya mahasiswa. Menurut Humas IPB semua upaya dilakukan dalam membangun kesamaan pemahaman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perubahan status PTN menjadi PTN-BH.

Peneliti menganalisa hasil penelitian di atas dengan menggunakan teori konstruksi atas realitas Berger dan Luckman, berdasarkan hasil telaah dari (Karman, 2015:11) dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Badan Litbang SDM Kemenkominfo. Seperti yang dikutip Karman, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann bukunya yang berjudul:” *The Social Construction of Reality*”, Berger dan Luckmann menggambarkan suatu situasi komunikasi interpersonal dimana tiap individu saling mengamati namun juga saling merespon kebiasaan mereka satu sama lain sehingga semua peserta komunikasi (partisipan) dapat mengantisipasi dan menggantungkan diri pada kebiasaan orang lain. Berkaitan dengan penelitian ini maka pihak lembaga/IPB melakukan kegiatan interaksinya melalui strategi komunikasi publik dimana setiap individu dapat saling merespon dan mengawasi situasi sehingga terbentuk pemahaman bersama terhadap latar belakang perubahan status

lembaga. Berangkat dari interaksi yang intens maka terkonstruksi berbagai kebiasaan yang terintegrasi dari semua sivitas akademik IPB untuk mencapai tujuan (keberhasilan) bersama.

Langkah yang ditempuh berkaitan dengan strategi komunikasi publik adalah perubahan kebijakan akibat perubahan status kampus menjadi PTN-BH antara lain: mengelola grup-grup komunikasi, masuk ke dalam grup-grup Whatsapp civitas akademika IPB, baik grup dosen, grup tendik dan grup mahasiswa, menampung keluhan berkaitan dengan PTN-BH untuk kemudian mencari solusinya. Menjadi jembatan antara kebijakan lembaga dengan harapan *stakeholder*. Menyediakan forum tatap muka untuk berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan lewat media. Menyediakan kotak layanan pengaduan. Semua dilakukan baik secara tatap muka ataupun tidak, baik dalam forum formal maupun informal.

Pembahasan melalui teori konstruksi atas realitas adalah berkaitan dengan latar belakang Humas IPB melakukan strategi komunikasi publik dalam upaya penyamaan persepsi guna mencapai pemahaman bersama tentang status PTN-BH yang harus disikapi secara bersama-sama oleh semua sivitas akademika, terutama mahasiswa. Perilaku repetitif pihak Humas IPB dalam melakukan komunikasi publik melalui berbagai media, terutama media yang menjangkau mahasiswa IPB dapat dikatakan sebagai "*habit*" yang intensif. Maka terbangun ke khasan yang merupakan strategi komunikasi public IPB yang di sebut "tipikasi". Seluruh upaya membangun kebiasaan bersama dengan para mahasiswa sehingga sudah tercipta semacam "aturan" bahwa komunikasi publik yang dilakukan Humas IPB berkaitan PTN-BH harus tuntas menjangkau seluruh sarasannya terutama mahasiswa IPB.

Bagaimana IPB Mensosialisasikan PTN-BH Kepada Para Mahasiswa

Pendekatan berikutnya adalah melalui *stakeholder* yang merupakan pihak internal dan eksternal perusahaan, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga luar perusahaan (LSM dan semacamnya), kaum minoritas dan semacamnya (Hadi Nor,2011). Dalam penelitian ini *stakeholder* di fokuskan pada mahasiswa IPB. Jones, Thomas dan Andrew (1999) menyatakan bahwa perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok kepentingan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan. Teori ini menekankan sifat alami suatu hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan *stakeholder*, Kepentingan semua legitimasi *stakeholder* memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain. Dan teori ini juga memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial (Ardianto, 2011: 76).

Maka dalam keterkaitan teori dengan penelitian ini adalah ditekankan pada *stakeholder orientation*, dimana dalam operasionalnya IPB dengan status PTN-BH diarahkan untuk mendahulukan keberpihakan terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, memegang kaidah peraturan yang berlaku, serta transparan dalam banyak tindakan. Dengan demikian, pengelola PTN-BH mengelola dan mengendalikan perguruan tinggi tidak sebatas didasarkan pada motif ekonomi saja tetapi juga motif sosial.

Disampaikan oleh Kabid Kehumasan IPB, bahwa: "Jadi otonom ini berdampak kepada kebolehan IPB memiliki bisnis yang diharapkan bisa menambah tingkat kesejahteraan pegawai dosen maupun tendik, hal-hal itu kita sampaikan kita komunikasikan, bahkan kita sebutkan, kita punya *holding company*, bergerakanya di apa saja, dalam satu tahun berapa yang bisa dia peroleh dari bisnis-bisnisnya." Penjelasan Kabid Humas IPB menggambarkan bahwa kegiatan komunikasi

publik yang dilakukan kepada *stakeholder* tidak terbatas pada masalah aturan saja, tetapi juga hal-hal yang dapat memberikan harapan baik. Mahasiswa IPB dilibatkan dalam pengelolaan bisnis-bisnis ini karena semua kerjasama adalah berkaitan dengan bidang keilmuan mereka.

Lebih lanjut Kabid Humas menjelaskan bahwa usaha bisnis itu sudah terealisasi meskipun belum sepenuhnya, "Terealisasinya itu dalam beberapa, memang sih belum intensif tetapi ada program yang modelnya tematik. Misalnya September Ceria, itu ada satu formula insentif khusus yang diberikan dalam bulan tersebut. Istilah September Ceria itu sudah menjadi hal yang umum populer. Yang kedua, kebanggaan bersama kalau kita punya bisnis bersama, itu ibaratnya kita punya bisnis peternakan, padi, kita sudah produksi benih, punya lahan sendiri, kerja sama dengan Pemda (Pemerintah Daerah), panen dan hasilnya dijual. Sehingga jangan sampe civitas itu tidak pernah nyicipin yang sudah diproduksi oleh kampus. Jadi diberikan paket natura, daging, beras, tapi memang belum setiap bulan. Minimal satu tahun sekali, bisanya kita mengambil momen sebelum lebaran..."

Pemberian paket hasil usaha itu tidak terbatas pada dosen dan tendik saja, tetapi para mahasiswa juga ikut mencicipinya. Pemerataan seperti ini menimbulkan sikap saling menghargai antara pengelola universitas dengan mahasiswa. Gambaran di atas merupakan upaya-upaya yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan "kesejahteraan" yang sama, setidaknya dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi semua sivitas akademika IPB. Langkah yang disampaikan oleh Kabid Kehumasan di atas adalah untuk mewujudkan harapan bersama. Hingga saat ini belum sepenuhnya berhasil, namun berkat interaksi yang terus menerus perlahan tapi pasti bahwa pada akhirnya lembaga akan dapat mencapai harapan mereka semaksimal mungkin.

Analisa pendekatan *Stakeholder Theory* menjelaskan bahwa melalui komunikasi publik

yang intensif dan tidak terbatas kepada pihak internal maupun eksternal maka pihak Humas IPB berusaha mengajak *stakeholder* (mahasiswa) untuk ikut mendukung program-program penerapan PTN-BH di IPB. Keberadaan *stakeholder* menjadi pertimbangan bagi pengambilan keputusan manajerial mereka.

PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KEBERADAAN PTN BH DI IPB.

Berkaitan dengan masalah *stakeholder* IPB yang salah satunya adalah mahasiswa, maka hubungan yang dibangun secara alamiah oleh pihak IPB dengan mahasiswa. Kabid Humas IPB menyampaikan bahwa divisi Humas IPB juga mengelola group organisasi mahasiswa berbasis kedaerahan. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa yang tidak tergabung dalam organisasi formal. Tujuan dari divisi Humas dengan ikut dalam group komunikasi mahasiswa adalah agar dapat memantau isu yang menjadi pembicaraan di grup tersebut. Bila ada informasi atau diskusi yang tidak selesai dalam grup di media sosial, maka divisi Humas akan memfasilitasi diskusi secara langsung.

Sebenarnya saluran atau media yang digunakan Humas IPB cukup banyak, mulai dari media konvensional hingga media digital. Semua dilakukan untuk membentuk pemahaman yang terintegrasi berkaitan penerapan PTN-BH, seperti disampaikan Kabid Humas IPB: "...padahal saluran itu banyak, tapi yang namanya mahasiswa ribuan, terkadang mempunyai pola yang berbeda-beda. Yang paling sulit bagi kami adalah mengelola komunikasi *medsos* yang tidak terintegrasi dengan kami. Ini yang masih berat". Namun diakuinya bahwa hubungan baik yang telah dijalin dengan lembaga kemahasiswaan sangat membantu Divisi Humas ketika ada informasi negatif terkait kebijakan IPB yang tidak terdeteksi sebelumnya. Inisiatif mahasiswa untuk saling berbagi informasi, menciptakan

hubungan yang solid antara Humas dan mahasiswa.

Upaya membentuk pemahaman mahasiswa terhadap penerapan PTN-BH di IPB diwujudkan dalam pembentukan program-program yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa. Seperti yang disampaikan Rektor IPB dan dikutip Kabid Humas IPB bahwa: "Kelebihan PTN-BH itu adalah adanya keleluasaan perguruan tinggi dalam mengelola institusi, terutama yang targetnya adalah untuk pencapaian kualitas. Misalnya kegiatan akademik, dibukanya prodi baru yang ternyata dibutuhkan pasar. PTN-BH banyak keleluasaan institusi yang akan berdampak kepada kualitas. Lebih bisa dinamis dalam mengatur kebutuhan mahasiswa. Nanti setelah lulus mereka mau jadi apa, itu perlu dibimbing. Ketika masih mahasiswa hingga kelulusan ada pembimbingan karir."

Pemahaman mahasiswa IPB terhadap penerapan PTN-BH terbentuk dan merupakan hasil dari upaya kegiatan komunikasi publik Humas IPB yang begitu "gencar." Presiden BEM IPB Panji Laksono dalam wawancara dengan penulis, menjelaskan bahwa mahasiswa memahami perubahan bentuk PTN menjadi PTN-BH memiliki sisi positif dan negatif. Keuntungan dari perubahan status ini menurut Panji yaitu PTN-BH mendukung mahasiswa dan dosen untuk berprestasi, karena hal ini juga mampu mendorong prestasi PTN. Disisi lain kekurangan dari PTN-BH seperti yang diketahui adalah berkurangnya dukungan dana dari pemerintah sehingga PTN harus mampu mengelola keuangannya secara mandiri. Hal ini berdampak pada dana operasional PTN yang dibebankan pada mahasiswa. Ketika ditanyakan lebih jauh mengenai pendapatnya seputar komersialisasi Pendidikan PTN, Panji menjelaskan, "...saya tidak bilang bahwa pendidikan dikomersialisasi, karna memang PTN berhak mengatur ini itu terkait keuangan.. Saya rasa *enggak* karna IPB sudah punya *holding company* milik IPB." Pemahaman Panji terkait perubahan status PTN-BH IPB yang

positif ini merupakan bentuk hubungan baik yang sudah dibangun antara Divisi Humas dan Lembaga Kemahasiswaan BEM.

Seorang aktivis lain dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa ia memahami kalau ada sisi negatif dari perubahan status ke PTN-BH, akan tetapi ada kebijakan lain dari Kemenristekdikti yang tidak mereka sepakati. Ia menambahkan, "...ini berkaitan dengan kemenristekdikti, jadi teman-teman aliansi BEM seluruh Indonesia mengkaji (bagaimana) kemenristekdikti menentukan UKT. Penentuan UKT ini tujuannya agar beban mahasiswa tidak menumpuk di semester awal. Saat perubahan ke PTN-BH agak lucunya kemenristekdikti kemudian malah membolehkan adanya uang pangkal buat jalur-jalur mandiri." Jalur masuk mandiri menurutnya tidak sejalan dengan semangat UKT yang memangkas uang pangkal. Karena menurutnya lagi, jalur masuk mandiri membuat PTN-BH memiliki keleluasaan untuk menentukan uang pangkal, disini sisi liberalisasi Pendidikan yang dikritisi oleh Aliansi BEM se-Indonesia. Ia menambahkan lagi, "saya tidak *sertamerta mempersalahkan* ini ke institusi IPB secara khusus, karena memang *harus-nya* pemerintah, kemenristekdikti." Jalur komunikasi yang terus dibangun dua arah antara Humas dengan organisasi kemahasiswaan, membuat mahasiswa memahami latarbelakang sebuah PTN-BH membuat keputusan terutama mengenai hal yang sensitif seperti penentuan UKT dan uang pangkal.

Para pemimpin organisasi kemahasiswaan di IPB merasa amat bersyukur karena memiliki hubungan yang baik dengan Manajemen melalui Divisi Humas. Koordinasi dan kolaborasi mereka selama ini berhasil menangkalkan berita-berita negatif yang berkembang di masyarakat sehingga tidak menjatuhkan nama baik IPB. Panji menceritakan beberapa waktu yang lalu hampir terjadi keributan mahasiswa daerah di kampus IPB Baranangsiang, "kemarin, yang baru-baru ini di kampus Baranangsiang, itu juga penangan

untuk pelayanan mahasiswa juga cepat. Saya dapat dari mahasiswa, RPH datang dari atasnya.” Namun berkat grup komunikasi Line, informasi segera diketahui dan langsung diatasi.

Harapan mahasiswa terkait perubahan status PTN-BH ini adalah dengan penyelenggaraan manajemen perguruan tinggi yang mandiri kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi tetap ditingkatkan. Jangan melupakan koor kompetensi perguruan tinggi yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi perguruan tinggi dalam hal keuangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan tidak lupa pengabdian kepada masyarakat. Semua hasil pencapaian dan prestasi perguruan tinggi diharapkan dapat berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat. Jangan sampai citra PTN-BH menjadi buruk karena isu komersialisasi pendidikan.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah di lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang melatar belakangi IPB menerapkan strategi komunikasi publiknya adalah dalam membangun kesamaan pemahaman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perubahan status PTN menjadi PTN-BH. Pihak lembaga dalam hal ini Humas IPB melakukan kegiatan interaksi melalui strategi komunikasi publik dimana setiap individu dapat saling merespon dan mengawasi situasi sehingga terbentuk pemahaman bersama terhadap latar belakang perubahan status lembaga; strategi komunikasi publik dilakukan pula dalam meredam dan memberikan solusi atas keresahan yang terjadi pada sivitas akademika IPB. Berangkat dari interaksi yang intens maka terkonstruksi berbagai kebiasaan yang terintegrasi dari semua sivitas akademik IPB untuk mencapai tujuan (keberhasilan) bersama. Strategi komunikasi publik mereka bersifat dinamis, dalam arti berubah mengikuti kemajuan jaman dan teknologi.

Institut Pertanian Bogor mensosialisasikan penerapan PTN-BH kepada mahasiswa ini adalah *stakeholder orientation*, dimana dalam kegiatan operasional IPB dengan status PTN-BH diarahkan untuk mendahulukan keberpihakan terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, memegang kaidah peraturan yang berlaku, serta transparan dalam banyak tindakan. Dengan demikian, pengelola PTN-BH mengelola dan mengendalikan perguruan tinggi tidak sebatas didasarkan pada motif ekonomi saja tetapi juga motif sosial. Bentuk sosialisai adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan media yang ada, mulai dari media cetak, elektronik hingga digital. Dalam penyampaian informasi dilakukan secara intensif hingga masuk ke setiap grup Whatsapp dan Line mahasiswa, tenaga pendidikan dan dosen untuk menjawab setiap permasalahan yang meresahkan akibat perubahan status ke PTN-BH ini. Diharapkan melalui komunikasi publik yang intensif dan tidak terbatas kepada pihak internal maupun eksternal maka pihak Humas IPB berusaha mengajak *stakeholder* (mahasiswa) untuk ikut mendukung program-program penerapan PTN-BH di IPB. Keberadaan *stakeholder* menjadi pertimbangan bagi pengambilan keputusan manajerial mereka.

Pemahaman mahasiswa IPB terhadap keberadaan PTN-BH di IPB adalah bahwa perubahan status PTN-BH diyakini sebagai langkah perbaikan bagi situasi dan kondisi perguruan tinggi negeri. Pemahaman mahasiswa IPB terhadap penerapan PTN-BH ini terbentuk dari upaya kegiatan komunikasi publik Divisi Humas IPB yang intensif.

Penelitian ini memberikan pengertian bagi berkembangnya PTN-BH yang diterapkan untuk mendorong mahasiswa mendapatkan prestasi dan inovasi, tetapi tidak melupakan esensi Tridrama Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Pilihan untuk menjadi PTN-BH berawal dari sebuah niat yang baik yaitu, pencapaian kualitas penyelenggaraan manajemen di perguruan tinggi. Penelitian ini memberikan hasil yang

dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya tentang bagaimana PTN-BH menjaga kualitas itu dalam dan penelitian selanjutnya ini bias memberikan bahasan yang semakin memberikan nilai lebih bagi PTN-BH.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisarizki. 2015. "Peran Humas PT. PLN (Persero) APJ Banten Utara Sebagai Proses Pemecahan Masalah." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*. Bandung: Simbiosis.
- Denzin, N.K. dan Linkoln Y.S. 2009. *Handbook of Qualitative Research (Edisi Bahasa Indonesia)*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Effendi, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha.
- Herdiana, Dedi, and Khoiruddin. 2016. "Peran Dan Strategi Humas Dalam Pembentukan Citra Perguruan Tinggi Islam." *ANIDA (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 15 (2): 317–38.
- <https://news.detik.com/berita/3201835/ribuan-mahasiswa-ugm-masih-demo-hingga-sore-ini-polisi-berjaga-jaga>. n.d. "No Titl."
- <https://siarpersma.id/2017/08/27/ptn-bh-perayaan-kemunduran-demokrasi/>. n.d. "No Tit."
- <https://www.kompasiana.com/ratnapratiwi/perguruan-tinggi-negeri-badan-hukum-di-indonesia>. n.d. "No."
- Ilmiati, Novi Rahma. 2016. "Peran PR Dalam Konstruksi Citra Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12 (12): 1–81.
- Karman. n.d. *Konstruksi Realitas Sosial, Sebagai Gerakan Pemikiran: Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Dan Informatika. Volume 5 No 3 2015 Hal. 11-23*.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal*. Jakarta: Media Grup Kencana Prenada.
- Kuswarno, Engkus. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Jakarta: Widya Padjajaran.
- Maudia, Fasya, Hanny Hafiar, Anwar Sani, Fakultas Ilmu Komunikasi, and Universitas Padjajaran. 2018. "Kontruksi Makna Reputasi Digital Melalui Perspektif Penyiar Radio." *Profetik Jurnal Komunikasi* 11 (01): 54–70.
- Rini, Kurnia Setiyo, Sugeng Rusmiwari, Herru Prasetya Widodo, Program Studi, Ilmu Komunikasi, and Universitas Tribhuwana Tungadewi. 2017. "Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Universitas Tribhuwana Tungadewi." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 6 (1): 34–37.
- Yin, R.K. 2012. *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.